

## Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon

Fikri Rohmaturizki<sup>1</sup>, Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>1</sup>[fikrirohmatrizki01@gmail.com](mailto:fikrirohmatrizki01@gmail.com), <sup>2</sup>[rahmawati@untirta.ac.id](mailto:rahmawati@untirta.ac.id)

Corresponding author: [fikrirohmatrizki01@gmail.com](mailto:fikrirohmatrizki01@gmail.com)

Submitted: 06/11/2025; Revised: 12/11/2025; Published: 23/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.394>

### Abstract

*The Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH) is a policy of the Cilegon Government at improving the welfare of low-income communities through housing rehabilitation, particularly in Cibeber District, where many houses are still uninhabitable. This study aims to evaluate the implementation of the program using Daniel Stufflebeam's CIPP model (Context, Input, Process, Product). The research employed a qualitative method with a descriptive design, collecting data through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of the Head of the Social Protection and Security Division, the Head of the Community Empowerment for Social Welfare Section, the Social Counselor (Cilegon City Social Service), the Operational Service Officer (Cilegon City Housing and Settlement Agency), the Housing Survey Officer (Cilegon City Housing and Settlement Agency), and the Head of Neighborhood Association (RW 02) of Link Kerotek, Kalitimbang Subdistrict, Cibeber District. The results show that the 2023 program did not run well. Many people still need proper housing. The budget was too small, so many proposals were not accepted, and the help given was not enough to fix the houses completely. During the process, the coordination between the related offices was not good, and there were also problems with bureaucracy and the e-grant system. The program was helpful for some people, but it did not really improve the overall housing condition. Overall, the RS-RTLH program has given some support to the community, but it still needs better budget management, clear information, and good cooperation between offices to work more effectively and reach more people.*

**Keywords:** Evaluation, Program, Social Assistance, Uninhabitable Houses

### Abstrak

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan kebijakan Pemerintah Kota Cilegon untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui perbaikan hunian, khususnya di Kecamatan Cibeber yang masih banyak rumah tidak layak huni. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Daniel Stufflebeam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial Kota Cilegon), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cibeber, Penyuluh Sosial Ahli Muda (Dinas Sosial Kota Cilegon), Penata Layanan Operasional (Dinas Perumahan

dan Pemukiman Kota Cilegon), Juru Survey Permukiman (Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Cilegon), dan Ketua RW 02 Link Kerotek Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tahun 2023 belum berjalan optimal. Aspek konteks, kebutuhan rumah layak masih sangat tinggi. Dari sisi input, keterbatasan anggaran menyebabkan banyak proposal tidak terakomodasi dan bantuan tidak mencukupi untuk perbaikan menyeluruh. Aspek proses, koordinasi antar pihak belum efektif, ditambah hambatan birokrasi dan kendala teknis pada sistem e-hibah. Sementara dari aspek produk, bantuan dirasakan bermanfaat, namun belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kualitas hunian. Secara keseluruhan, program RS-RTLH telah membantu sebagian masyarakat, tetapi diperlukan peningkatan anggaran, transparansi, dan koordinasi agar lebih efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Program, Bantuan Sosial, Rumah Tidak Layak Huni

## Pendahuluan

Provinsi Banten masih menghadapi tantangan kemiskinan meskipun tingkat kemiskinannya tergolong lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, persentase penduduk miskin menunjukkan ketidakmerataan dan ketidakstabilan dari tahun ke tahun, bahkan pada Maret 2024 jumlahnya mencapai 791.610 orang dengan tren peningkatan sejak 2021. Salah satu daerah yang turut mengalami kenaikan angka kemiskinan adalah Kota Cilegon, sehingga diperlukan upaya terpadu dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Cilegon berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 30 Tahun 2016. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan rumah layak huni yang aman, nyaman, dan mampu menunjang fungsi sosial serta pendidikan keluarga.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- RTLH) merupakan program yang dilakukan untuk memenuhi hak bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di Cilegon akan kebutuhan Rumah layak yang huni. Dasar pelaksanaan Program RS-RTLH adalah Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari APBD Kota Cilegon. Tujuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

adalah Rumah Tidak Layak Huni dengan menilai pemenuhan indikator karakteristik rumah. Secara tidak langsung menggunakan data kemiskinan. Dengan cara ini, upaya pengentasan kemiskinan dapat dipercepat. (Harahap, 2021). ALADIN (Atap, Lantai, Dinding) merupakan standar Rumah Tidak Layak Huni menjadi persoalan.

Kota Cilegon terdiri dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 470.378 jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 2.900 jiwa per kilometer persegi dan jumlah penduduk miskin mencapai 3,98 persen, salah satunya di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Adanya Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) ini sangat membantu masyarakat yang tinggal di rumah-rumah yang sudah tidak layak huni, mereka yang tidak mampu membangun atau memperbaiki rumah mereka ekonomi sehingga mereka tidak mampu untuk menciptakan rumah yang layak dan aman, berkat adanya Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) masyarakat yang mendapatkan program tersebut saat ini bisa bertempat tinggal di rumah yang nyaman dan aman. Upaya yang dilakukan melalui pendekatan tridaya yaitu, pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022, target pelaksanaan program RS-RTLH selama periode 2020–2024 adalah 1.500 Kepala Keluarga (KK). Namun, hingga tahun 2023, program ini baru terealisasi untuk 732 KK. Pada tahun 2020, dari target 200 KK, hanya 107 KK yang terealisasi karena terhambat pandemi Covid-19. Tahun 2021 terealisasi 182 KK dari target 300 KK, tahun 2022 mencapai target penuh yaitu 272 KK, dan tahun 2023 terealisasi 204 KK dari target 300 KK. Adapun pada tahun 2024 program ini tidak terlaksana karena tidak terakomodasi dalam rencana kerja. Dengan demikian, masih terdapat 841 KK yang belum mendapatkan bantuan RS-RTLH. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perubahan kewenangan pengelolaan program dari Dinas Sosial Kota Cilegon ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan program di lapangan.

**Tabel 1.4**  
**Rekapitulasi Data RS-RTLH Kota Cilegon 2020 S/D 2023**

No	Kecamatan	Sudah Dibantu Tahun 2020-2023	Belum Dibantu Tahun 2020-2023	Total
1	Cibeber	95	178	312
2	Cilegon	82	107	189
3	Jombang	68	33	101
4	Citangkil	91	85	176
5	Purwakarta	118	79	197
6	Pulomerak	106	138	244
7	Gerogol	38	50	88
8	Ciwandan	134	171	266
<b>Total</b>				732

Sumber: Data Dinas Sosial Cilegon Tahun 2020-2023.

Peneliti telah melakukan observasi di delapan kecamatan di Kota Cilegon yang menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa Kecamatan Cibeber menghadapi lebih banyak permasalahan dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini terlihat dari data pada Tabel 1.4, di mana Kecamatan Cibeber memiliki selisih terbesar antara jumlah rumah yang telah dan belum mendapatkan bantuan. Permasalahan yang muncul di Kecamatan Cibeber meliputi beberapa aspek. Pertama, anggaran yang dialokasikan untuk program RS-RTLH belum mencukupi kebutuhan rehabilitasi rumah secara menyeluruh, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, meskipun mekanisme pencairan dana telah diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Ketiga, keterbatasan tenaga pendamping dan kurangnya sosialisasi kepada penerima bantuan menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan maksimal. Akibatnya, muncul keluhan warga mengenai proses pendataan yang dianggap tidak transparan dan tidak merata antara RT/RW dan pihak kecamatan. Keempat, tidak semua pihak yang terlibat hadir secara konsisten dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial RS-RTLH di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Permasalahan tersebut mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya komunikasi antara pelaksana dan penerima bantuan, hambatan birokrasi dalam proses penyaluran dana, serta banyaknya proposal bantuan dari kelurahan yang tidak dapat diakomodasi akibat kendala teknis pada sistem *e-hibah* dan terbatasnya waktu penginputan data. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih dalam dan mengetahui bagaimana Evaluasi Program Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kecamatan Cibeber di Kota Cilegon.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Administrasi Publik**

Administrasi publik menurut Pasolong sebagaimana dikutip oleh Ni Putu Tirka Widianti (2022:25) merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Sementara itu, Ibrahim dalam Ni Putu Tirka Widianti (2022:25) menjelaskan bahwa administrasi publik mencakup seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan proses manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pembangunan melalui mekanisme kerja yang terstruktur dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya, Caiden sebagaimana dikutip oleh Ni Putu Tirka Widianti (2022:25) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan fungsi yang mencakup pengambilan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan strategi, serta pembangunan kerja sama dengan DPR dan organisasi kemasyarakatan guna memperoleh dukungan publik dan pendanaan bagi program pemerintah. Selain itu, administrasi publik juga meliputi kegiatan penataan dan penyesuaian organisasi, pengarahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, serta pengendalian yang dijalankan oleh lembaga eksekutif maupun lembaga pemerintahan lainnya.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah keseluruhan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup fungsi pengambilan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta kerja sama antar lembaga dan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien dengan dukungan sumber daya manusia dan mekanisme kerja yang terstruktur.

### **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang berfungsi menilai sejauh mana suatu kebijakan telah direncanakan, diterapkan, dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Meskipun sering dianggap sebagai tahap akhir, evaluasi sejatinya mencakup seluruh aspek kebijakan, mulai dari perencanaan, isi, pelaksanaan, hingga hasilnya. Menurut Nurcholis (2007), evaluasi merupakan penilaian menyeluruh terhadap input, proses, output, dan outcomes kebijakan pemerintah daerah. Melalui kegiatan evaluasi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan berjalan efektif serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Stufflebeam dan Coryn (dalam Agustino, 2023) mendefinisikan evaluasi sebagai proses pengumpulan dan penerapan informasi yang bertujuan menilai manfaat, nilai, dan keadilan suatu kebijakan. Sementara itu, Rossi et al. menegaskan bahwa evaluasi kebijakan menggunakan metode penelitian sosial untuk menyelidiki efektivitas program intervensi sosial. Dengan demikian, evaluasi kebijakan memiliki peran penting dalam menilai keberhasilan dan keberlanjutan suatu program publik secara sistematis dan objektif, sekaligus menyediakan dasar yang kuat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan di masa mendatang.

### **Model Evaluasi Kebijakan Publik**

Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam awalnya digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan di Amerika Serikat melalui Elementary and Secondary Education Act (ESEA). Seiring perkembangannya, model ini menjadi kerangka evaluasi yang komprehensif dan dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti proyek, program, lembaga, maupun kebijakan

publik. Model CIPP terdiri atas empat komponen utama. Pertama, **Evaluasi Konteks (Context Evaluation)** yang berfungsi mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang yang menjadi dasar lahirnya kebijakan atau program, serta menjawab pertanyaan “What should we do?” agar kebijakan yang dirancang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, **Evaluasi Masukan (Input Evaluation)** yang berfokus pada strategi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dengan menjawab pertanyaan “How should we do it?” agar pelaksanaan program berjalan efisien dan tepat sasaran. Ketiga, **Evaluasi Proses (Process Evaluation)** yang menilai sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan rencana, menjawab pertanyaan “Are we doing it as planned?”, serta memberikan umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan di lapangan. Keempat, **Evaluasi Produk (Product Evaluation)** yang menilai hasil dan dampak program melalui pertanyaan “Did the program work?” dengan meninjau efektivitas, manfaat, dan keberlanjutan hasil program.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami makna mendalam dari pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak secara nyata. Menurut Creswell (2013:4–5), metode kualitatif merupakan cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial secara komprehensif dan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Cibeber yang memiliki luas wilayah 21,49 km<sup>2</sup> dengan enam kelurahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah penerima bantuan untuk melihat hasil pelaksanaan program di lapangan. Wawancara dilakukan kepada pihak pelaksana dan penerima

bantuan menggunakan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris dan interpretatif yang akurat untuk menggambarkan efektivitas dan tantangan pelaksanaan Program RS-RTLH di Kecamatan Cibeber.

## **Pembahasan**

Kota Cilegon, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, merupakan daerah otonom yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berfungsi sebagai pintu gerbang utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan luas wilayah sekitar 175,5 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 8 kecamatan dan 43 kelurahan, Cilegon memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 23,5°C–32,4°C dan curah hujan sekitar 126,5 mm per bulan. Sebagai kota urban dengan sumber daya alam yang terbatas, Cilegon tetap mengalami perkembangan pesat dalam bidang fisik, sosial, dan ekonomi, didukung oleh posisinya yang strategis secara geostrategis di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Kota ini dikenal sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa, dengan tiga sektor industri utama, yaitu industri baja, non-baja, dan industri kecil, yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi serta pembangunan wilayahnya.

Penelitian ini melibatkan sembilan informan, yang terdiri atas lima informan kunci dan empat informan sekunder. Informan kunci berasal dari Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Cilegon, serta pihak Kecamatan Cibeber yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Sementara itu, informan sekunder berasal dari unsur masyarakat, yaitu ketua RW dan penerima bantuan RS-RTLH di Kelurahan Kalitimbang dan Kecamatan Cibeber. Para informan berusia antara 40 hingga 68 tahun dan dipilih karena dianggap memahami pelaksanaan serta dampak program bantuan sosial tersebut.

Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian berjudul “Evaluasi Program Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Cibeber Kota Cilegon”, yang dianalisis menggunakan teori evaluasi Daniel

Stufflebeam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Cilegon telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek dan faktor yang perlu diperhatikan sesuai dengan komponen evaluasi Stufflebeam, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berikut ini merupakan pembahasan hasil penelitian evaluasi tersebut.

### **Evaluasi Konteks**

Menurut Stufflebeam, evaluasi konteks dilakukan untuk mengetahui kebutuhan, menetapkan tujuan, dan menentukan kriteria keberhasilan suatu program. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan evaluasi konteks pada Program RS-RTLH di Kota Cilegon belum berjalan maksimal.

Program ini sebenarnya bertujuan membantu masyarakat miskin agar memiliki rumah yang layak, aman, dan nyaman. Namun, pelaksanaannya masih menemui kendala, terutama dalam pendataan penerima bantuan yang belum akurat. Akibatnya, masih ada penerima yang tidak tepat sasaran karena faktor kedekatan dengan aparat desa.

Meski begitu, program ini tetap membawa manfaat, seperti memperbaiki kondisi rumah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program sangat bergantung pada kerja sama semua pihak serta pemahaman masyarakat bahwa bantuan ini bersifat swadaya. Secara singkat, evaluasi konteks menunjukkan bahwa Program RS-RTLH di Cilegon sudah bermanfaat, tetapi perlu perbaikan dalam pendataan dan pelaksanaan agar lebih tepat sasaran.

### **Evaluasi Masukan**

Evaluasi masukan bertujuan untuk menilai strategi, sumber daya, kendala, dan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program RS-RTLH di Kecamatan Cibeer, Kota Cilegon, sudah memiliki arah dan sistem yang cukup baik. Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi kepada kelurahan mengenai prosedur pengajuan bantuan melalui sistem E-Hibah. Langkah ini membantu kelurahan menyiapkan data calon penerima dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Program ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti aparat kelurahan, pendamping lapangan, dan masyarakat penerima manfaat. Para pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan setiap tahap, mulai dari sosialisasi hingga pemantauan pembangunan. Namun, di beberapa lokasi masih kekurangan tenaga kerja, sehingga masyarakat harus mencari tukang dari luar daerah.

Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain masalah kepemilikan lahan, karena sebagian penerima tinggal di tanah warisan tanpa dokumen resmi, sehingga pengajuan bantuan terhambat. Selain itu, anggaran yang terbatas membuat dana bantuan sebesar Rp15.000.000 (Rp12.000.000 untuk bahan bangunan dan Rp3.000.000 untuk upah kerja) belum cukup untuk renovasi menyeluruh. Waktu pelaksanaan yang singkat, hanya tiga bulan, juga membuat beberapa pembangunan tidak selesai dengan baik.

Secara keseluruhan, Program RS-RTLH di Cilegon sudah memiliki strategi dan sistem pelaksanaan yang jelas, tetapi masih perlu perbaikan dalam perencanaan, koordinasi antarinstansi, dan penyesuaian anggaran agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran.

### **Evaluasi Proses**

Evaluasi masukan bertujuan untuk menilai strategi, sumber daya, kendala, dan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Program RS-RTLH di Kecamatan Cibeer, Kota Cilegon, sudah memiliki arah dan sistem yang cukup baik. Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi kepada kelurahan mengenai prosedur pengajuan bantuan melalui sistem E-Hibah. Langkah ini membantu kelurahan menyiapkan data calon penerima dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Program ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti aparat kelurahan, pendamping lapangan, dan masyarakat penerima manfaat. Para pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan setiap tahap, mulai dari sosialisasi hingga pemantauan pembangunan. Namun, di beberapa lokasi masih kekurangan tenaga kerja, sehingga masyarakat harus mencari tukang dari luar daerah.

Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain masalah kepemilikan lahan, karena sebagian penerima tinggal di tanah warisan tanpa dokumen resmi, sehingga pengajuan bantuan terhambat. Selain itu, anggaran yang terbatas membuat dana bantuan sebesar Rp15.000.000 (Rp12.000.000 untuk bahan bangunan dan Rp3.000.000 untuk upah kerja) belum cukup untuk renovasi menyeluruh. Waktu pelaksanaan yang singkat, hanya tiga bulan, juga membuat beberapa pembangunan tidak selesai dengan baik.

Secara keseluruhan, Program RS-RTLH di Cilegon sudah memiliki strategi dan sistem pelaksanaan yang jelas, tetapi masih perlu perbaikan dalam perencanaan, koordinasi antarinstansi, dan penyesuaian anggaran agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran.

### **Evaluasi Produk**

Evaluasi produk dilakukan untuk menilai hasil akhir dan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuannya. Dalam Program RS-RTLH di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, evaluasi ini berfokus pada dampak, kesesuaian target dengan hasil, serta indikator keberhasilan program.

Berdasarkan hasil wawancara, program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekitar 80% penerima merasa puas karena bantuan tersebut membantu mereka memperbaiki rumah yang sebelumnya tidak layak huni. Program ini juga menumbuhkan semangat masyarakat untuk memperbaiki rumah secara mandiri. Namun, beberapa penerima menyebutkan bahwa dana bantuan masih kurang, sehingga mereka perlu menambah biaya pribadi. Meski begitu, program ini dinilai berhasil meningkatkan kualitas tempat tinggal, rasa aman, dan gotong royong warga.

Dari segi pencapaian, pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan, pedoman teknis, dan jadwal yang ditetapkan. Walau hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan karena keterbatasan dana, masyarakat tetap merasa puas. Beberapa informan menyarankan agar program ke depan juga memperhatikan aspek sosial dan pendidikan agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

Keberhasilan program terlihat dari meningkatnya jumlah rumah layak huni, tingginya kepuasan penerima bantuan, serta partisipasi aktif masyarakat. Adanya kerja sama dan gotong royong juga menjadi bukti kuat keberhasilan program.

Secara keseluruhan, Program RS-RTLH di Cibeber telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan berjalan sesuai tujuan, meskipun masih perlu peningkatan dalam jumlah bantuan dan jangkauan penerima agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan.



Gambar 1. Rumah Sebelum dan Sesudah Direhabilitasi Pada Tahun Anggaran 2023

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Daniel Stufflebeam, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon belum berjalan secara optimal. Pada aspek evaluasi konteks, ditemukan bahwa sasaran dan outcome program belum sepenuhnya tercapai karena masih ada masyarakat penerima yang belum merasakan manfaat secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan kebutuhan dan tujuan program belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan.

Pada aspek evaluasi masukan (input), strategi dan sistem pelaksanaan program sebenarnya telah disusun dengan cukup baik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi

sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, kepemilikan lahan yang tidak memenuhi syarat, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal perencanaan dan koordinasi lintas instansi agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, pada aspek evaluasi proses (process), pelaksanaan program RS-RTLH masih menemui berbagai hambatan di lapangan. Walaupun telah dilakukan upaya mitigasi untuk mengatasinya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan belum sepenuhnya sesuai rencana. Meskipun demikian, terdapat langkah-langkah positif yang diambil oleh pelaksana program untuk memperbaiki pelaksanaan di tahap berikutnya. Sementara pada aspek evaluasi produk (product), hasil yang dicapai belum maksimal karena masih ada faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas dan dampak program terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran untuk perbaikan. Dinas Sosial dan Dinas Perumahan Permukiman disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi fasilitator lapangan agar mereka dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan perencanaan berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan program, optimalisasi penggunaan anggaran agar tidak membebani masyarakat, serta peningkatan koordinasi antarinstansi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi rutin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Program RS-RTLH di Kecamatan Cibeber dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Bandung: Alfabeta.  
Alfabeta.
- Amalia, N. (2024). *Perbaikan hunian sebagai langkah penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Sosial dan Pembangunan
- Creswell W. Jhon. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mied*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. CV Alfabeta.

- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah
- Dunn, W. N. (2010). *Public policy analysis: An introduction* (4th ed.). New York: Pearson Education. London: SAGE Publications Ltd. Jakarta: Grasindo. Mada University Press.
- Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugroho, Riant (2011). *Public Policy: dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo..
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patton, M. Q. (2012). *Essentials of utilization-focused evaluation*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pramitha, D. (2022). *Analisis faktor penyebab kemiskinan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, A. (2011). *Memahami metode-metode penelitian: Suatu tinjauan teoritis dan praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Rodiyah, R., Sari, D. P., & Lestari, A. (2021). *Kebijakan publik dan pelayanan publik*. Malang: UB Press. Rosda Karya
- Subarsono, Agustinus. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka
- Suharsimi, A. (2007). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Widanti, N. P. T. (2022). *Administrasi publik: Konsep, teori, dan paradigma*. Yogyakarta: Deepublish.